



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

## Dengarkan Masukan Warga, Kemantren Mantriijeron Gelar FGD



**Gelaran FGD dan Forum Konsultasi Publik di Kemantren Mantriijeron, Selasa (11/6).**

Pemerintah Kemantren Mantriijeron menggelar Forum Group Discussion (FGD) dan Forum Konsultasi Publik di Aula Kemantren Mantriijeron, Selasa (11/6). Kegiatan ini mengundang berbagai stakeholder, mulai dari perwakilan kampung, TPPKK, hingga akademisi. FGD dan Forum Konsultasi Publik ini merupakan bagian dari penyusunan kembali standar pelayanan publik. Selain itu, melalui forum ini jajaran



Pemerintah Kemantren Mantriijeron mencoba untuk mendengarkan berbagai aspirasi warga. Kepala Jawatan Umum Kemantren Mantriijeron, Dewi Utami Pratama Rini, menjelaskan ada beberapa regulasi yang berubah, sehingga standar pelayanan publik juga harus diperbarui. Ada beberapa hal yang berubah, salah satunya berkaitan dengan perizinan makam. Sebelumnya, izin makam diberlakukan berbayar. Pada regulasi terbaru, aturan itu dihapuskan dan diganti menjadi

gratis atau tak dipungut biaya. Ada juga perubahan regulasi soal penyelenggaraan pondokan. "Dalam regulasi baru, kemantren harus melaksanakan rekomendasi teknis pelaksanaan penyelenggaraan pondokan. Dulu tidak ada, tetapi dalam aturan yang baru ada rekomendasi teknis sehingga kami buat standar pelayanan untuk rekomendasi pondokan," ujar Dewi, Selasa (11/6). Aspirasi warga nantinya diindikasikan dengan memperbaiki standar pelayanan publik yang nantinya menjadi dasar pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Peneliti Research Center For Politics and Government (Polgov) UGM, Farha Kamalia, menyatakan standar pelayanan publik harus diperbarui secara berkala. Sebab, ada berbagai regulasi yang sudah tak relevan dengan perkembangan zaman. Menurutnya, intensitas pembaruan survei pelayanan publik dilakukan berdasarkan kebutuhan dari masing-masing instansi pemerintah. "Misalnya ada aturan baru dari Pemerintah Pusat, maka pemerintah daerah harus merevisi standar pelayanan publik," kata Farha. (ANI Annissa Karim\*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Mantriijeron	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005